



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 344-9230 PSW. 5114, 5605, (021)3516976
SITUS www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S-1730 /PB.1/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Risiko *Mandatory* pada Kantor Wilayah
Ditjen Perbendaharaan dan KPPN

15 Februari 2018

- Yth.
1. Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Sehubungan dengan penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2018, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil Rapat Unit Pemilik Risiko (UPR) dan Komite Manajemen Risiko Ditjen Perbendaharaan telah disepakati bahwa risiko "Kualitas penyerapan anggaran K/L yang rendah" dan "Penilaian Satker yang kurang baik terhadap pelayanan unit kerja WBK/WBBM" menjadi risiko *mandatory* pada kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan.
2. Penentuan kedua risiko tersebut sebagai risiko *mandatory* berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Risiko "Kualitas penyerapan anggaran K/L yang rendah" telah ditetapkan sebagai risiko di Kementerian Keuangan, Eselon I Ditjen Perbendaharaan, dan Eselon II Direktorat Pelaksanaan Anggaran.
 - b. Risiko tersebut berkaitan dengan tugas dan fungsi serta Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kanwil DJPb maupun KPPN, yaitu "Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L".
 - c. Terdapat IKU pada Kemenkeu-Wide yang diturunkan ke Kemenkeu-One DJPb dan Kemenkeu-Two Setditjen Perbendaharaan terkait WBK/WBBM, yaitu "Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK" dengan target 100% (target untuk DJPb sebanyak 15 unit kerja).
 - d. Telah ditetapkan sebanyak:
 - 1) 23 unit kerja di lingkungan DJPb yang akan mengikuti penilaian WBK/WBBM tahun 2018, terdiri dari 3 KPPN yang mengikuti penilaian WBBM oleh Tim Penilai Nasional (TPN) KemenPAN-RB dan 20 unit kerja (1 Kanwil DJPb dan 19 KPPN) yang mengikuti penilaian WBK oleh Tim Penilai Kementerian (TPK) Itjen Kemenkeu dan TPN
 - 2) 82 KPPN yang melaksanakan akselerasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM tahun 2018.
3. Menindaklanjuti hasil Rapat UPR dan Komite Manajemen Risiko sebagaimana tersebut diatas, Setditjen Perbendaharaan telah melakukan pembahasan secara internal dan pembahasan bersama dengan Direktorat Pelaksanaan Anggaran untuk merumuskan referensi risiko yang akan di-*mandatory*-kan ke Kanwil DJPb dan KPPN.
4. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada Saudara untuk menambahkan risiko dalam Formulir Profil Risiko dan Formulir Penanganan Risiko sebagai berikut:
 - a. Risiko "Kualitas penyerapan anggaran K/L yang rendah" menjadi risiko *mandatory* pada seluruh Kanwil DJPb dan KPPN.
 - b. Risiko "Penilaian Satker yang kurang baik terhadap pelayanan unit kerja WBK/WBBM" menjadi risiko *mandatory* pada 23 unit kerja di lingkungan DJPb yang akan mengikuti penilaian WBK/WBBM tahun 2018 dan 82 KPPN yang melaksanakan akselerasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM tahun 2018.

5. Rumusan risiko dan rencana penanganan terhadap kedua risiko dimaksud dapat menggunakan referensi sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Direktorat Jenderal,

Haryana

NIP 196006031985021001

Tembusan:

Direktur Jenderal Perbendaharaan

Formulir Profil dan Peta Risiko

Unit Organisasi : Kantor Wilayah DJPb Provinsi / KPPN ...
 Periode Penerapan : 2018

A. Profil Risiko

Sasaran Organisasi	Risiko				Kategori Risiko	Sistem Pengendalian Yang Dilaksanakan	Indikator Risiko Utama (IRU)	
	No	Kejadian	Penyebab	Dampak			Nama	Batasan Nilai
Kanwil: Pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat regional KPPN: Pengelolaan perbendaharaan negara yang profesional, transparan dan akuntabel	1	Kualitas penyerapan anggaran K/L yang rendah	1. Rendahnya komitmen pejabat pengelola keuangan negara terhadap tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN 2. Gagal lelang 3. Perubahan kebijakan terkait pelaksanaan program/ kegiatan yang memerlukan revisi. 4. Kualitas perencanaan kegiatan dan anggaran satker yang buruk. 5. terjadinya retur SP2D satker. 6. Kegagalan atau keterlambatan pelaksanaan kegiatan satker (penumpukan kegiatan di akhir tahun). 7. Keterlambatan penyelesaian atau penyampaian tagihan satker ke KPPN. 8. Pengembalian atau kesalahan SPM. 9. Pencairan dana yang tidak sesuai RPD (RPD harian satker tidak akurat). 10. Data kontrak terlambat disampaikan dan didaftarkan ke KPPN. 11, UP satker tidak direvolving secara tepat waktu. 12. Penyampaian LPJ Bendahara terlambat dilakukan.	Penurunan Kinerja terkait persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L	Kebijakan, operasional, kepatuhan	Melaksanakan Monev Pelaksanaan Anggaran (EPA, RPA, Rakor PA, Bimtek PA)	Persentase jumlah satker K/L yang tidak melakukan revisi DIPA secara terjadwal	Batas Aman : 5% dari jumlah satker K/L Batas Atas : 20% dari jumlah satker K/L
Organisasi yang fit for purpose	2	Penilaian Satker yang kurang baik terhadap pelayanan unit kerja WBK/WBBM	1. Petugas pelayanan yang tidak disiplin mematuhi jam layanan 2. Terdapat pertanyaan survei WBK/WBBM yang multi interpretasi	Penurunan kinerja	Kepatuhan, Operasional	1. Permenpan 52 tahun 2014 tentang pembangunan ZI menuju WBK/WBBM 2. KMK 426 2017 tentang penilaian pembangunan ZI menuju WBK di lingkungan Kementerian Keuangan 3. Kepdirjen KEP-814/PB/2016 tentang akselerasi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	Jumlah petugas/pegawai Front Office yang tidak standby pada saat jam layanan	Batas Atas : 1 Batas Aman : 0

Formulir Penanganan Risiko

Unit Organisasi : Kantor Wilayah DJPb Provinsi / KPPN ...
 Periode Penerapan : 2018

Prioritas Risiko	Kejadian	Rencana Penanganan					Penanggung Jawab
		Opsi Penanganan Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko	Output	Target	Jadwal Implementasi	
1	Kualitas penyerapan anggaran K/L yang rendah	Menurunkan kemungkinan terjadinya risiko	<i>one on one meeting</i> dengan satker K/L dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran	Laporan	1 (satu) laporan	Triwulan I, II, III dan IV	Kanwil dan/KPPN
2	Penilaian Satker yang kurang baik terhadap pelayanan unit kerja WBK/WBBM	Mengurangi kemungkinan terjadinya Risiko	Monitoring atas kehadiran petugas pelayanan pada jam layanan oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI) pada Kanwil ataupun KPPN Mengkomunikasikan ke KPA untuk mendukung pelaksanaan survei terkait pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Melakukan simulasi pengisian kuesioner oleh Satker sesuai pedoman survei	Laporan pemantauan Surat/laporan kunjungan Laporan	10 Laporan (Feb - Nov 2018) 1 Surat/laporan kunjungan 2 Laporan	bulanan Triwulan I Bulan Mei dan September	Kanwil dan/KPPN